

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama penelitian ini membahas metodologi penelitian yang meliputi: Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti, rumusan masalah mengarahkan fokus penelitian. Tujuan penelitian ini mencakup empat hal utama dalam penelitian filsafat, yaitu inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis, dan pemahaman baru. Kegunaan penulisan menjelaskan kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan penerapannya. Metode penelitian menguraikan pendekatan filsafat yang melibatkan interpretasi, induksi, deduksi, koherensi intern, idealisasi, dan deskripsi. Sistematika pembahasan menggambarkan struktur penelitian agar pembaca mudah mengikuti alur pembahasan di setiap bab.

1.1. Latar Belakang

Hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan isu yang semakin mendesak dan penting dalam diskursus sosial dan hukum saat ini. Fenomena perampasan hak-hak masyarakat lokal di NTT, yang melibatkan penguasaan tanah, sumber daya alam, dan hak-hak budaya, telah menjadi masalah yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat adat di NTT, dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik, sering kali menghadapi ancaman terhadap hak-hak mereka akibat tekanan dari berbagai kepentingan, baik dari pihak pemerintah, perusahaan swasta, maupun entitas lain yang berupaya mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.¹

Pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan-kebijakan yang tidak melihat realitas yang ada dalam masyarakat sering kali menjadi penyebab utama

¹ Arief Rianto Kurniawan & Yuliana Primawardani, *"Dampak Bisnis Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal: Studi Dampak Bisnis Pariwisata Terhadap Hak Asasi Manusia," Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 18, No. 1, (2022), hlm. 117.

perampasan hak-hak ini.² Masyarakat adat, yang sebagian besar bergantung pada tanah dan lingkungan sekitar untuk kelangsungan hidup mereka, sering kali terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini mereka kelola secara berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan dampak yang mendalam bagi struktur sosial dan ekonomi mereka, serta mengancam keberlanjutan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum gagal untuk melindungi hak-hak masyarakat, tetapi sebaliknya mengancam eksistensi dan hak masyarakat adat. Tanpa hukum, sebuah tatanan menjadi *chaos* karena setiap orang berusaha menguntungkan dirinya dengan menghancurkan yang lain.³ Situasi seperti ini dalam bahasa Hobbes disebut sebagai *Homo homini lupus*, di mana manusia adalah serigala bagi sesamanya.⁴

Masyarakat adat Desa Wae sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT merupakan salah satu korban dari proyek pembangunan pemerintah yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal atas tanah, alam, adat, dll. Seperti yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai barat bersama PT Geo Dipa Energi atau PT SMI/GeoDipa yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya panas bumi (geothermal) mengatakan bahwa wilayah Wae Sano, memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan kawasan pusat pembangkit Listrik dengan menggunakan energi panas bumi. Hal ini tentunya mendapat pro dan kontra dari Masyarakat. PEMDA Manggarai Barat menyebut Sebagian besar masyarakat menyetujuinya, namun anggapan itu ditepis oleh pihak masyarakat, bahkan mereka menyebut bahwa mereka hanyalah korban pariwisata super premium Labuan Bajo.⁵

² Celine Anatta and Agustinus Sutanto, "Kompromi Lokalitas Dan Modernitas Pada Desa Adat Pubabu-Besipae Dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular," Jurnal *STUPA, Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 939.

³ Rahmi Zubaedah Farhan Abdurrahman Habib, "Mertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 7, (2024), hlm. 465.

⁴ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 230.

⁵ Tim Floresa, "Sebut Kini Proyek Geothermal Wae Sano Gunakan 'UU Indonesia,' Bukan 'UU Bank Dunia,' Pemkab Manggarai Barat 'Paksa' Warga Untuk Terima," Floresa.co, 2023, <https://floresa.co/reportase/mendalam/57624/2023/11/09/>. Diakses pada tanggal 11 September 2024, jam 17. 15.

Kawasan Wae Sano bagi Masyarakat sekitar bukanlah kawasan pembangkit listrik. Kekhawatiran akan potensi bencana alam seperti pembocoran gas dan tercemarnya danau dan mata air dan hilangnya hak-hak Masyarakat adat, seperti tanah, kebun maupun kuburan adat juga menjadi dasar penolakan Masyarakat.⁶

Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada argumen-argumen dan penolakan masyarakat dengan proyek ini, lebih dari itu, penelitian ini juga menyoroti pandangan-pandangan dan argumen-argumen dari masyarakat yang juga mendukung proyek ini. Bagi masyarakat yang mendukung proyek ini, pembangunan membutuhkan pengorbanan. Jika sebuah wilayah ingin maju maka wilayah itu harus berani mengorbankan segala sesuatu untuk pembangunan tersebut. Pada dasarnya juga pembangunan selalu mengarah kepada kepentingan umum, oleh karena itu kepentingan individu harus dikorbankan. Masyarakat yang mendukung proyek ini melihat bahwa pemerintah selalu memperhatikan kepentingan masyarakatnya, mereka telah mengkaji dan mempertimbangkan banyak hal mengenai pembangunan ini, dan tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya.

Selanjutnya penelitian ini juga menyoroti posisi masyarakat yang tidak berkomentar terhadap kasus ini, atau masyarakat yang netral diantara pro dan kontra. Menurut mereka sebenarnya kasus ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang memadai antara pemerintah dan masyarakat, dan kemudian tidak adanya kesepakatan antara masyarakat itu sendiri, terutama pihak yang pro dan kontra, mengenai posisi yang harus mereka ambil dalam kasus ini. Kemudian mengenai kasus ini mereka lebih memilih netral agar tetap menjaga relasi diantara mereka.

Penelitian ini beranggapan bahwa kasus di atas berakar pada hilangnya pengakuan pemerintah atas hak-hak dan eksistensi masyarakat lokal di Nusantara, termasuk masyarakat Wae Sano dan juga adanya *misrecognition* antar masyarakat terutama masyarakat yang

⁶ Tim Flores, "Sebut Kini Proyek Geothermal Wae Sano Gunakan 'UU Indonesia,' Bukan 'UU Bank Dunia,' Pemkab Manggarai Barat 'Paksa' Warga Untuk Terima," Flores.co, 2023, <https://flores.co/reportase/mendalam/57624/2023/11/09/>. Diakses pada tanggal 11 September 2024, jam 18.00.

menolak dan mendukung proyek ini. Penelitian ini juga beranggapan bahwa dalam kasus ini terdapat tiga kelompok besar yang bisa mengarah kepada konflik, yaitu pemerintah, kelompok masyarakat yang mendukung proyek ini, dan juga kelompok masyarakat yang menolak proyek ini. Oleh karena itu, untuk menyoroti perspektif tersebut dan membaca konflik geothermal Wae Sano, penelitian ini akan memakai konsep Axel Honneth tentang politik pengakuan dan *disrespect*.⁷

Honneth memahami *disrespect* sebagai penolakan atau kegagalan dalam memberikan salah satu atau lebih dari tiga bentuk pengakuan yaitu cinta, hak, dan solidaritas. *Disrespect* dapat berkembang menjadi *misrecognition*. Honneth memahami *misrecognition* sebagai bentuk pengakuan yang tidak tepat atau tidak memadai terhadap individu atau kelompok. Ini berbeda dengan *non-recognition* (tidak adanya pengakuan sama sekali) dan *disrespect* (kurangnya penghargaan). Jadi sangat jelas bagi Honneth bahwa *disrespect* dan *misrecognition* adalah dua hal yang berbeda. *Disrespect* adalah penolakan pengakuan, sedangkan *misrecognition* adalah bentuk pengakuan yang salah atau tidak tepat.⁸

Honneth melihat bahwa salah satu penyebab melemahnya kesadaran kritis masyarakat modern terletak pada kesalahpahaman mendasar yang memosisikan kebebasan individu seolah-olah bertentangan dengan penghormatan (*respect*) terhadap yang lain. Ini telah menjadi cara pandang yang baru, sehingga lebih membuka ruang bagi terjadinya konflik sosial daripada perdamaian atau harmoni sosial. Lemahnya pemahaman yang benar mengenai akar persoalan terutama mengenai hak individu atas kebebasan serta kewajiban untuk menghormati yang lain menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya resolusi atas konflik sosial.⁹ Sebagaimana yang telah diungkapkan Honneth

⁷ Axel Honneth, (Terj. Joel Anderson), *The Struggle For Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, (Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1995), hlm. 160. Dalam kutipan selanjutnya, karya Honneth ini akan ditulis **Struggle for Recognition**.

⁸ *Ibid.*, hlm. viii.

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

Sebagaimana ditunjukkan dengan jelas oleh perjuangan sosial dalam beberapa dekade terakhir, keadilan menuntut lebih dari sekadar distribusi barang material yang adil. Karena bahkan jika konflik kepentingan diadili secara adil, sebuah masyarakat akan tetap kurang secara normatif sejauh anggotanya secara sistematis tidak mendapatkan pengakuan yang layak mereka terima.¹⁰

Berangkat dari gagasannya mengenai *Recognition* atau teori pengakuannya, Honneth kemudian melihat bahwa individu baru dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai subjek ketika individu mendapat pengakuan (*recognition*) dari individu yang lain. Bagi Honneth, Pengakuan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan papan, pangan, dan sandang. Pengakuan memungkinkan seseorang menemukan identitas dirinya dari, hal ini dapat dilihat dari cara seseorang menampilkan dirinya, misalnya seorang warga negara akan diakui oleh negaranya apabila ia memiliki pengakuan dari negaranya berupa KTP/ PASPOR, seseorang tidak akan diakui sebagai seorang intelektual apabila ia tidak memiliki Ijazah sebagai bukti pengakuan terhadap dirinya. Hal serupa juga berlaku dalam rana agama, dalam Gereja Katolik hukuman yang terberat adalah “tidak diakui” (Ekskomunikasi).

Honneth melihat bahwa perjuangan hidup manusia ditandai dengan tujuan abadi manusia yaitu untuk mendapatkan pengakuan.¹¹ Selanjutnya bagi Honneth, subjektivitas individu hanya bisa dicapai secara intersubjektif. Honneth melihat relasi intersubjektivitas individu ditandai dengan adanya pengakuan dimana individu saling menghargai, menerima, dan yang terpenting adalah pengakuan timbal balik. Mengenai politik pengakuan, Honneth membangunnya diatas filsafat roh dari Hegel. Pada dasarnya, tujuan Honneth mengembangkan teori sistematis mengenai pengakuan adalah sebagai solusi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan (*disrespect*), oleh karena itu dalam pemikirannya mengenai politik pengakuan, Honneth melihat konsep ini lebih tepat sebagai filsafat dan panduan moral yang mendasari hubungan antarindividu dalam masyarakat, bukan sebagai teori sosial atau

¹⁰ “As social struggles of the last few decades have made clear, justice demands more than the fair distribution of material goods. For even if conflicts over interests were justly adjudicated, a society would remain normatively deficient to the extent that its members are systematically denied the recognition they deserve.” *Ibid.*, hlm. x.

¹¹ Reza A.A Wattimena, *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2015). hlm. 120.

metode praktis (strategi) untuk menyelesaikan konflik sosial.¹² Dan inilah yang membuat teori Pengakuan dari Axel Honneth mendapat kritikan keras dari Nancy Fraser.¹³

Di Dalam pandangannya mengenai politik Pengakuan, Honneth melihat terdapat tiga aspek penting yang dapat mengembangkan identitas praktis dan peran dalam diri seorang individu untuk menemukan pengakuan dalam relasi intersubjektivitasnya. Aspek yang pertama adalah cinta dan kepedulian. Cinta dan kepedulian orang lain adalah hal utama yang menjadi syarat bagi individu untuk mengembangkan rasa percaya dirinya. Aspek yang kedua adalah aspek hukum. Individu yang diakui baik secara hukum maupun hak-hak yang melekat padanya akan menemukan rasa hormat dirinya. Aspek yang ketiga adalah solidaritas. Dalam solidaritas individu akan menemukan rasa harga dirinya. Disini pencapaian individu sangatlah penting. Solidaritas memungkinkan relasi antar subjek mempertahankan tujuan sebagai tujuan bersama dan nama bersama. Dengan kata lain dalam solidaritas individu ingin berarti bagi orang lain.¹⁴

Kasus Geothermal di Wae Sano, dalam konsep *Recognition*, dikategorikan sebagai pelanggaran hak (*disrespect*) terhadap masyarakat Wae Sano karena sebagian masyarakat memandang bahwa pihak pemerintah tidak memperhatikan hak-hak mereka sebagai masyarakat. Dan juga adanya *misrecognition* antara masyarakat terutama kelompok yang menolak dan yang mendukung proyek ini. Dalam proyek ini masyarakat menilai bahwa pemerintah selalu menyembunyikan dampak-dampak negatif dari proyek Geothermal dan pemerintah juga tidak memberikan jaminan bagi masyarakat apabila nantinya masyarakat mengalami kerugian. Dalam kasus ini masyarakat ingin agar hak mereka juga harus diakui oleh pemerintah, bahwa mereka adalah masyarakat sipil yang mempunyai hak sebagai warga

¹² Axel Honneth, *The Struggle For Recognition*, **Op. Cit.**, hlm. 8.

¹³ Rian Adhivira Prabowo, "Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 76.

¹⁴ Adelbert Snijders, *Antropologi Manusia Paradoks Dan Seruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 30.

negara, sehingga pihak pemerintah tidak serta merta menyetujui dan mendanai proyek Geothermal yang direncanakan oleh PT SMI/GeoDipa.¹⁵

Tetapi bagi masyarakat yang mendukung proyek ini, mereka melihat bahwa pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, pemerintah telah mengkaji dan mempertimbangkan segala aspek dalam proyek ini bersama para ahli, dan menurut pemerintah proyek ini tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas masyarakat setempat, jadi proyek ini dinilai akan mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi masyarakat umum.

Maka, berkaca dari kasus di atas, Penulis ingin meramu tulisan ini dalam judul *KONFLIK GEOTHERMAL WAE SANO DALAM PERSPEKTIF AXEL HONNETH MENGENAI POLITIK PENGAKUAN*

¹⁵ Ecio Viana, "Permmabar Kupang Sampaikan Alasan Penolakan Eksplorasi Geothermal Wae Sano," Pos-Kupang, 2020, <https://kupang.tribunnews.com/2020/01/29/>. Diakses pada tanggal 11 September 2024, jam 19.25.

1.2. Rumusan Masalah

Politik Pengakuan, yang dikemukakan Honneth, menekankan pentingnya pengakuan dalam membangun identitas dan hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Konsep ini menyoroti hubungan antara pengakuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Konflik Geothermal di Wae Sano merupakan salah satu isu krusial yang berkaitan dengan pengakuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini, konsep pengakuan Honneth digunakan oleh peneliti untuk melihat dan membaca konflik geothermal Wae Sano. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jelas mengenai konsep politik pengakuan Honneth dalam kasus ini, penelitian ini dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apa itu politik pengakuan menurut Honneth? (2) bagaimana kita dapat memahami dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam kasus ini? (3) Bagaimana politik pengakuan Honneth melihat dan menjelaskan kasus ini dan apa solusi yang ditawarkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya berfokus pada empat hal pokok yang menjadi tujuan penelitian filsafat yang meliputi: inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis dan pemahaman baru.

Pertama adalah inventarisasi, dalam penelitian ini, inventarisasi yang dilakukan adalah mempelajari karya-karya Axel Honneth, menguraikannya, dan sedapat mungkin menjelaskannya terutama karya-karya yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Selanjutnya mengumpulkan juga tulisan-tulisan lainnya melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan Axel Honneth, kemudian meneliti hal-hal apa saja yang dijelaskan oleh penulis-penulis lainnya mengenai Axel Honneth, dan berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam tulisan-tulisan mereka. Menjelaskan masalah-masalah yang mereka ajukan dan usaha

pemecahan yang mereka tawarkan. Dengan demikian, peneliti memahami apa itu politik pengakuan yang dimaksudkan oleh Axel Honneth.¹⁶

Kedua adalah evaluasi kritis, dalam penelitian ini, evaluasi kritis meliputi studi lansung terhadap pemikiran Axel Honneth, terutama karyanya yang berjudul *The Struggle For Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Kemudian melakukan perbandingan terutama padangan para ahli terhadap politik pengakuan Axel Honneth. Selanjutnya memperlihatkan kelemahan dan kekuatan argumen yang mereka ajukan, tanpa memberikan suatu pemecahan dari peneliti sendiri.¹⁷

Ketiga adalah sintesis, dalam penelitian ini, sintesis meliputi usaha peneliti dalam memahami pemikiran Axel Honneth yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dalam inventarisasi dan evaluasi kritis, dan mengambil keputusan berdasarkan data-data terdahulu yang telah diperoleh.¹⁸

Keempat adalah pemahaman baru, dalam penelitian ini pemahaman baru adalah tujuan utama yang mau dicapai oleh peneliti, pemahaman baru merupakan hal yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lainnya. Dan dalam tulisan ini pemahaman baru yang dikemukakan penulis adalah memahami bagaimana hubungan antara politik pengakuan Axel Honneth dalam kasus geothermal Wae Sano.¹⁹

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan sedikit sumbangan terhadap dunia keilmuan, terutama terhadap filsafat sendiri sebagai sebuah ilmu. Melalui tulisan ini penulis sedikit dapat Menjawab kritik marx terhadap filsafat, dimana Marx mengatakan bahwa filsafat hanya sebagai interpretasi terhadap dunia, tapi yang terpenting adalah mengubah

¹⁶ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2023), hlm. 62.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

dunia. Disini Marx melihat bahwa filsafat tidak mampu melihat realitas dalam masyarakat, apalagi untuk memecahkan persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini juga ingin mengatakan bahwa filsafat sebagai ilmu adalah ilmu yang berbicara mengenai sesuatu yang ada dalam masyarakat, ilmu yang berpijak dari realitas kehidupan manusia dan bukan ilmu yang sangat abstrak bagi manusia.

Penulis juga mengharapkan bahwa tulisan ini sangat berguna bagi masyarakat umum. Terutama bagi masyarakat Wae Sano yang ingin menolak proyek Geothermal, Pembangkit Listrik dengan energi panas bumi. Masyarakat Wae Sano yang merupakan sebuah komunitas diharapkan agar mereka merasa bahwa wilayah Wae Sano adalah bagian dari jati diri mereka, mereka tetap memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan tetap menjaga solidaritas mereka sebagai masyarakat, walaupun terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan untuk saling menghargai pendapat dan keunikan masing-masing.

Selanjutnya yang paling penting, penulis juga mengharapkan bahwa tulisan ini sangat berguna bagi kebijakan pemerintah Manggarai Barat untuk mengambil keputusan, terutama mengenai proyek Geothermal yang akan dilakukan di wilayah Wae Sano. Dimana saat ini, rencana Pembangunan ini merupakan topik yang sangat hangat diantara masyarakat Manggarai Barat, terutama di Kecamatan Sano Nggoang. Rencana Pembangunan ini telah menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Dan juga tulisan ini memberikan sedikit sumbangan bagi Keuskupan Ruteng²⁰ yang telah mengambil sikap dalam proyek ini, agar tulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil sikap kedepannya.

1.5. Metode Penelitian

²⁰ Ebed de Rosary, "Warga Tetap Menolak Proyek Geothermal Wae Sano, Kenapa?," mongabay, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/06/28/warga-tetap-menolak-proyek-geothermal-wae-sano-kenapa/>. Diakses pada tanggal 4 September 2024, jam. 18. 15. Diakses pada tanggal 4 September 2024, jam. 18. 15.

Tulisan ini memakai metode penelitian filsafat dengan menggunakan Metode Pragmatisme, yang dilihat oleh Anton Bakker dan Achmad Zubair sebagai model 6.A. yaitu Penelitian mengenai masalah aktual.²¹ Metode pragmatisme adalah metode yang melihat filsafat dari segi praktis dan aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari, yang meliputi kajian pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Selanjutnya Tahap terakhir adalah komparasi data dan analisis filosofis yang menggunakan semua metodis umum yang berlaku dalam setiap penelitian filsafat yang meliputi:

Pertama adalah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan hal yang sangat penting bagi filsafat untuk menyingkapkan kebenaran, bahwa manusia dapat memperoleh pemahaman lebih utuh mengenai sesuatu, baik itu tentang makna bahasa ataupun benda-benda. Dalam penulisan ini, interpretasi dilakukan untuk melihat dan memahami hubungan antara teori, yaitu politik pengakuan Axel Honneth dan masalah yang diangkat, yaitu konflik geothermal Wae Sano.²²

Kedua adalah induksi dan deduksi. Secara umum induksi atau generalisasi, dipahami sebagai penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Dan deduksi dipahami sebagai penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke yang khusus.²³ Dalam penulisan ini, penulis mengkaji politik pengakuan Axel Honneth dan kasus geothermal Wae Sano, dari persoalan-persoalan khusus ke umum (induksi) dan persoalan-persoalan umum ke yang khusus (deduksi). Peneliti akan mengidentifikasikan dengan pemikiran Axel Honneth tanpa menghilangkan obyektivitasnya.

Ketiga adalah koherensi intern. Koherensi intern adalah melihat relasi-relasi dan struktur-struktur internal dalam satu struktur yang konsisten untuk memahami hakekat manusia baik dari sifat maupun pemikirannya, agar dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran Honneth serta mengaitkannya dengan kasus geothermal Wae Sano. Dimana pemikiran

²¹ Anton Bakker, *Op. Cit.*, hlm. 107.

²² *Ibid.*, hlm. 110

²³ *Ibid.*, hlm. 110

Honneth ditetapkan dengan susunan logis, sistematis, disesuaikan dengan gaya serta metodenya.²⁴

Keempat adalah idealisasi. Dengan bertitik tolak dari pengalaman dan data-data empiris, penulis dapat mengkonstruksi gagasannya menjadi realisasi ideal untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang objek material yang diteliti. Politik pengakuan Axel Honneth akan digunakan oleh penulis untuk membaca konflik geothermal Wae Sano.²⁵

Kelima adalah deskripsi. Deskripsi merupakan hasil penelitian filosofis yang dituangkan ke dalam tulisan dan dibahasakan secara logis dan sistematis agar gambaran utuh tentang objek yang telah diteliti dapat dibaca sebagai hasil runtutan pemikiran atas investigasi pemikiran filosofis yang melahirkan wacana baru.²⁶ Dengan metode ini peneliti akan menguraikan secara tepat dan terperinci mengenai kajian yang diteliti mengenai konflik geothermal Wae Sano dalam perspektif politik pengakuan Axel Honneth.²⁷

1.6. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini dibagi dalam lima bab. Bab satu berisi pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas biografi dan karya-karya Axel Honneth. Bab tiga mengulas gagasan Honneth tentang Politik Pengakuan. Bab empat membahas relevansi pemikiran tersebut terhadap konflik geothermal Wae Sano. Bab lima adalah penutup yang memuat uraian ulang, kesimpulan dan rekomendasi penelitian selanjutnya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111.